

**PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR
TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI
DENGAN JANDA TANPA MAHAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum



OLEH :

IRIANTO
10221019979

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR"

Poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligami*. Sedangkan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang menjadi pokok masalah, bagaimana pendapat Muhammad Shahrur tentang hukum mahar dalam poligami? Bagaimana *istinbath* hukum Muhammad Shahrur tentang kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar? Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatannya menggunakan analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran atau pendapat Muhammad Shahrur dalam konteksnya dengan kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar. Data Primer, yaitu karya Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Elsaq Press, Yogyakarta, 2004; *Al-Kitab wa al- Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", Elsaq Press, Yogyakarta, 2004. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Teknik pengumpulan data berupa teknik *library research*. Analisis menggunakan data kualitatif. Di samping itu digunakan pula *content analysis* metode deduktif dan induktif.

Hasil dari pembahasan: menurut Muhammad Shahrur sesungguhnya Allah Swt, tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Dalam hubungannya dengan mahar, Muhammad Shahrur

menyatakan: sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut, maka Dia memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin dengan maksud mencari ridla Allah dengan mengawini mereka dan mengasuh anak-anak yatimnya. Pendapat Muhammad Shahrur di atas menunjukkan bahwa dalam pandangannya, mahar bukan suatu kewajiban yang harus dibayar dalam perkawinan poligami.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR

A. Biografi Muhammad Shahrur, Pendidikan Dan Karyanya	17
---	----

1. Biografi	17
2. Pendidikan.....	17
3. Karyanya	18
B. Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan	
Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar	21
C. Istinbath Hukum Muhammad Shahrur.....	24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN POLIGAMI

A. Mahar	38
1. Pengertian Mahar dan Landasan Hukumnya	38
2. Macam-Macam Mahar	43
3. Gugurnya Kewajiban Membayar Mahar.....	51
B. Poligami	58
1. Pengertian Poligami	56
2. Sejarah Poligami	62
3. Syarat Poligami	64

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD
SYAHRUR TENTANG KEBOLEHAN
POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR**

A. Analisis Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar	69
B. Analisis Istinbath hukum Muhammad Syahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penggabungan (**الضم**) dan saling memasukkan (**التداخل**) serta percampuran (**يستعمل**), diartikan juga sebagai persetubuhan dan akad (*al-wathi wa fil aqad*).⁵ (**الوطء وفي العقد**)

¹ Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 47.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁵ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

Pendapat di atas tidak berbeda dengan Al-Shan'ani yang dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”.⁶

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda, akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

حدثنا سعيد بن ابي مریم اخبرنا محمد بن خعفر اخبرنا حمید بن ابي حمید الطویل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنهم يقول خاء ثلاثة رهط الي بيوت ازواخ النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقلوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انافاني اصلي الليل ابد وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Maryam telah memberitahu kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Humaid

⁶ Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 251

bin Abi Humaid ath-Thawail, sesungguhnya dia telah mendengar dari Anas bin Malik r.a., katanya: Ada tiga orang laki-laki datang berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi Saw; bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi itu terlalu sedikit. Mereka berkata: "Kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni, Allah." Salah seorang dari mereka berkata: "Untuk saya, saya akan selalu shalat sepanjang malam selama-lamanya." Orang kedua berkata: "Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka." Orang ketiga berkata: "Saya tidak akan pernah mendekati wanita. Saya tidak akan kawin selama-lamanya." Setelah itu Rasulullah saw. datang. Beliau berkata: "Kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah! Saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Tuhan dibandingkan dengan kamu, tetapi saya berpuasa dan berbuka. Saya shalat dan tidur, dan saya kawin. Barangsiapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak termasuk ke dalam golonganku." (HR. al-Bhukhari)

Dari hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Namun demikian, dalam kenyataannya ada sebagian kaum Adam yang tidak cukup beristri satu maka kemudian ia melakukan poligami.

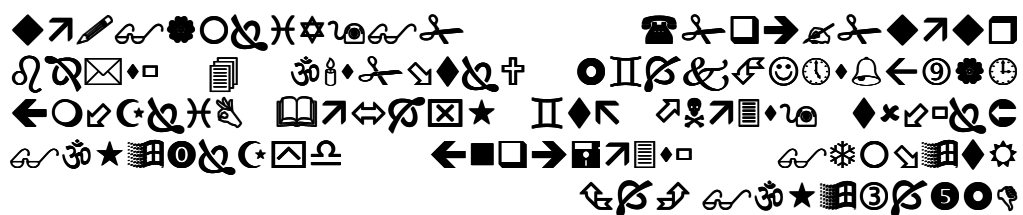
Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligami*.⁸ Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan poligami adalah beristri lebih dari satu.⁹

Pada setiap upacara perkawinan, termasuk poligami, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43.

⁹ Moch. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 149

Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.¹⁰ Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).¹¹ Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Firman Allah Swt:



Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya (QS an-Nisa (4): 4).¹²

Terhadap ketentuan di atas, Muhammad Shahrur berpendapat, poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt, sehingga tidak mengherankan kalau Tuhan meletakkannya pada awal surat an-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia, seperti yang terlihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam *at-Tanzil* yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqih, seperti biasanya, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan

¹⁰ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41.

¹¹ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 60 – 61

¹² Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.¹³

Selanjutnya menurut Muhammad Shahrur, Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa yang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.¹⁴

Dalam hubungannya dengan mahar, Muhammad Shahrur menyatakan bahwa Allah SWT memberikan sebagai kemudahan terhadap persoalan mengawini ibu dari anakanak yatim tersebut, maka Dia (Allah) memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin pada saat mengawininya dengan maksud mencari ridla Allah dengan mengawini mereka dan mengasuh anak-anak yatimnya.¹⁵

Pendapat Muhammad Shahrur di atas menunjukkan bahwa dalam pandangannya, mahar bukan suatu kewajiban yang harus dibayar dalam perkawinan poligami. Oleh karena itu menurut penulis, masalah tersebut masih kontroversial yang membutuhkan penelitian khusus yakni berupa skripsi.

¹³ Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: Elsaq Press, 2004, hlm. 425

¹⁴ *Ibid*, hlm. 428

¹⁵ *Ibid*, hlm. 431

Menurut Imam Taqiyuddin Abubakar, mahar (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *shadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dan di dalam sunnah disebut *mahar, 'aliqah dan 'aqar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.¹⁶

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, mahar/maskawin adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹⁷ Sedangkan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary menegaskan, mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*shidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Shidaq* dinamakan juga dengan "*Mahar*."¹⁸

Menurut Ahmad al-Syarbashi, mahar adalah hak yang wajib untuk istri. Mahar adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, juz 2, hlm. 60

¹⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV. Asy Sifa', tth, hlm. 373

¹⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 88

dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai. Dalilnya adalah firman Allah Swt di dalam surah al-Nisa,

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian dari mahar itu kepadamu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S. an-Nisa': 4).

Menariknya judul dan tokoh di atas karena Muhammad Shahrur merupakan seorang pembaharu pemikiran Islam yang unik. Berbeda dengan kebanyakan para pembaharu pemikiran Islam yang rata-rata memiliki basis ilmu-ilmu keislaman, ia memiliki basis ilmu-ilmu teknik. Pendidikan formal keagamaannya hanya diperoleh ketika ia duduk di bangku SD hingga SMU. Namun demikian, ia tetap menyempatkan diri untuk melakukan refleksi dan penelitian dalam disiplin ilmu keislaman di sela-sela kesibukannya sebagai profesional di bidang mekanika tanah dan teknik bangunan. Untuk itu, di samping menulis buku di bidang teknik seperti *Handasat al-Asasat* (teknik bangunan) dan *Handasat at-Turbah* (Teknik Pertanahan), ia juga menghasilkan empat buah buku tebal dalam kajian keislaman, yakni *al-Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1990), *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994), *al-Islam wa allman: Manzhumah Qiyam* (1996), dan *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh allslami* (2000). Keempat buku tersebut dipandang oleh banyak kalangan sebagai hasil kerja yang kontroversial. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai telur ayam jantan (*baydhah al-dik*), walaupun telur tapi tidak berguna, karena tidak bisa

menetas. Alasan tuduhan mereka adalah karena karya-karya itu bukan dihasilkan oleh orang yang kapabel di bidangnya.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁹ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Muhammad Shahrur tentang hukum mahar dan poligami?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Muhammad Shahrur tentang kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Shahrur tentang hukum mahar dan poligami.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Muhammad Shahrur tentang kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan baru dijumpai ada beberapa buku atau kitab yang membahas persoalan mahar dan poligami secara umum.

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

Secara khusus belum ditemukan kepustakaan yang memfokuskan Muhammad Shahrur dalam konteksnya dengan kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar. Buku yang dimaksud di antaranya:

1. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al- Madzahib al-Khamsah*.

Menurut penyusun kitab ini, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetapi sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akad-nya *fasid* (tidak sah) dan di-*faskh* sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*.²⁰

2. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*.
penyusun kitab ini memaparkan bahwa disunnahkan pernikahan itu tidaklah diadakan kecuali dengan *shadaq* (mas kawin). Apa saja yang bisa menjadi harga, maka ia boleh menjadi *shadaq*. Jika disebutkan *shadaq* dengan rahasia dan *Shadaq* dengan terang-terangan, maka *shadaq* itu adalah yang dengannya terjadi akad.²¹

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 7, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 365

²¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 233

3. Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Kitab ini menegaskan, mahar/maskawin adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.²²
4. Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. dalam karyanya ini, Lili Rasyidi menjelaskan, pada setiap upacara perkawinan, undang-undang Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang, atau barang, atau uang bersama-sama dengan barang. Kebiasaan memberikan maskawin dalam bentuk uang dan barang ini merupakan kebiasaan yang lazim dilakukan di negeri ini, mengingatkan kuatnya pengaruh adat setempat. Sebagai contoh, maskawin yang diberikan berupa sejumlah uang tertentu ditambah dengan sehelai songket atau sebungkus cincin merupakan hal yang lazim pada setiap perkawinan di kalangan orang Melayu di negeri ini. Jumlah dan bentuk maskawin akan disebutkan secara rinci pada waktu akad nikah dilaksanakan, sedangkan penyerahannya dilakukan di hadapan orang yang akan melaksanakan perkawinan dengan disaksikan oleh dua orang.²³

²² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Sifa', tt, hlm. 373

²³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 1991, hlm. 41-42

5. Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*. Disunnahkan untuk menyebutkan Mahar (maskawin) di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (tuan) dengan Amatnya.²⁴
6. Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*. *Shidaq* ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*Shidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Shidaq* dinamakan juga dengan "*Mahar*."²⁵
7. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. menurut Ahmad Rofiq, kata *mahar* dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4 "Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".²⁶
8. Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*. Maskawin (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh

²⁴ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 42-43

²⁵ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 88

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 100

(*wathi'*). Di dalam Al-Qur'an maskawin disebut: *shadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dan di dalam sunnah disebut *mahar, 'aliqah dan 'aqar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.

9. Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi an-Nisa*. Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).²⁷

Dari beberapa referensi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan secara detail dan spesifik pendapat Muhammd Shahrur dalam konteksnya dengan kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar. Oleh sebab itu spesifikasi penelitian lebih mengarah pada persoalan kontroversil yaitu tentang dibolehkannya poligami tanpa mahar. Dari sini tampak corak khusus pemikiran Muhammad Shahrur, ia mempunyai pendapat yang unik dalam

²⁷ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. Abdul Ghofur, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996, hlm. 411

menafsirkan kembali al-Qur'an dan Sunnah, secara khusus, dan dalam membangun hukum menjadi sebuah sistem komprehensif secara umum.

Muhammad Shahrur adalah sosok fenomenal. Pemikirannya dahsyat, mengundang pro dan kontra. Bagi yang pro, memujinya, sedangkan bagi yang kontra, kitab-kitabnya, khususnya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*" dianggap lebih berbahaya dari *The Satanic Verses*-nya Salman Rushdie. Sudah banyak karya tulis yang hadir ke permukaan dalam rangka merespon pikiran-pikirannya, ada yang serius dan ada juga yang sebaliknya yaitu sekedar menyatakan tidak setuju secara emosional terhadap apa yang digagas oleh pembaharu dari Syiria ini.²⁸

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁹ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan

²⁸ Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", Yogyakarta: Elsaq Press, 2004, hlm. Xi

²⁹ Wardi Bacthiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 1.

data itu,³⁰ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran atau pendapat Muhammad Shahrur dalam konteksnya dengan kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar

2. Sumber Data

- a. Bahan Primer, yaitu karya Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Ahli litauzi', Damsik, 2000. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Ahli litauzi', Damsik.
- b. Bahan Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah-langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

³¹ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.³² Dalam hal ini hendak menguraikan, menggambarkan dan menganalisis pemikiran atau pendapat Muhammd Shahrur tentang kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar peneliti juga menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Di samping itu digunakan pula *content analysis* pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengelola pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku dan komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.³³

5. Metode Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat penulis simpulkan dan dianalisa, maka selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang khusus untuk dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

³² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 187.

- b. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang umum dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang mahar dan poligami yang meliputi mahar (pengertian mahar dan landasan hukumnya, macam-macam mahar, gugurnya kewajiban membayar mahar), poligami (pengertian poligami, syarat poligami, sejarah poligami).

Bab ketiga berisi mengenal Muhammad Syahrur yang meliputi biografi Muhammad Shahrur, pendidikan dan karyanya (latar belakang Muhammad Shahrur, pendidikan, karyanya).

Bab keempat berisi pemikiran hukum Muhammad Syahrur, meliputi langkah-langkah istimbath hukum Muhammad Syahrur, Poligami dengan janda tanpa mahar menurut Muhammad Syahrur.

Bab kelima merupakan kesimpulan, dan saran.

BAB II

PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR

A. Biografi Muhammad Shahrur, Pendidikan Dan Karyanya

1. Biografi

Tokoh yang pernah menggoncangkan dunia pemikiran Arab ini bernama DR. Ir. Muhammad Shahrur b. Dayb. Ia lahir di Damaskus Syria pada tanggal 11 April 1938, ketika negeri tersebut masih dijajah oleh Perancis walaupun sudah mendapatkan status separuh merdeka. Pendidikan tingkat *ibtida* dan *i'dad*-nya dimulai dari Madrasah Damaskus. Sementara pendidikan tingkat tsanawiyahnya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, sebuah madrasah yang namanya diambil dari nama seorang penulis Arab yang hidup tahun 1849 - 1903 dan gigih menyerukan perlawanan bangsa Arab atas bangsa Turki yang korup. Shahrur lulus dari madrasah tersebut pada tahun 1957.³⁴

2. Pendidikan

Muhammad Shahrur pemikir liberal asal Syria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di *al-Midan* di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pada 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964) dan sepuluh tahun

³⁴ Muhyar Fanani, *Muhammad Syahrur dan Konsepsi Baru Sunnah dalam Teologia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2004, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, hlm. 144

kemudian di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu dia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1971). Kemudian ia diangkat sebagai Professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999).³⁵

3. Karyanya

Karyanya di samping buku-buku yang terkait dengan Teknik Bangunan, adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muasirah* (1992); *Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama* (Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat); *al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam* (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama) Nahw Usul jadidah li al-Fiqh al-Islami pada tahun 2000.

Peristiwa penting yang akhirnya mengubah kehidupan Shahrur terjadi pada bulan Maret 1958, tepat pada umurnya yang ke-19. Saat itu, Shahrur berangkat ke Uni Soviet untuk belajar di *Faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute*. Enam tahun kemudian (1964), ia mendapatkan gelar diploma di bidang Teknik Sipil dari fakultas tersebut. Merasa perlu mempersiapkan karir di masa depan, setelah lulus diploma Shahrur kembali ke Syria terlebih dahulu untuk mempersiapkan karirnya di Damaskus. Pada tahun 1965, ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diplamanya. Pada tahun 1967, sebenarnya ia akan melakukan *research ke Imperial College*

³⁵ Muhammad Shahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, Terj. M. Zaid Su'di, "Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok", Yogyakarta: Jendela, 2002, hlm. xiii - xv

London. Akan tetapi karena pada tahun itu pecah perang Juni antara Syria dan Israel yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Inggris dan Syria, maka pihak universitas akhirnya mengirimnya untuk belajar ke *National University of Ireland, University College Dublin* di Republik Irlandia untuk mengambil program Magister dan Doktor dalam bidang yang telah digeluti sebelumnya, yakni Teknik Sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan (*soil mechanics and foundation engineering*), gelar M.Sc. dalam bidang mekanika tanah dan teknik bangunan diperolehnya pada tahun 1969 dari universitas tersebut. Sementara gelar doktornya diperoleh pada tahun 1972 juga dari universitas tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, pada tahun itu juga Shahrur kembali ke Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Hingga sekarang walaupun sudah pensiun dari universitas Damaskus, ia masih aktif mengembangkan bidang yang ditekuninya itu.³⁶

Shahrur adalah seorang pembaharu pemikiran Islam yang unik. Berbeda dengan kebanyakan para pembaharu pemikiran Islam yang rata-rata memiliki basis ilmu-ilmu keislaman, ia memiliki basis ilmu-ilmu teknik. Pendidikan formal keagamaannya hanya diperoleh ketika ia duduk di bangku SD hingga SMU. Namun demikian, ia tetap menyempatkan diri untuk melakukan refleksi dan penelitian dalam disiplin ilmu keislaman di sela-sela kesibukannya sebagai profesional di bidang mekanika tanah dan teknik bangunan. Untuk itu, di samping menulis buku di bidang teknik

³⁶ Muhammad Sharur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", Elsaq Press, Yogyakarta, 2004, hlm. xi -xii

seperti *Handasat al-Asasat* (teknik bangunan) (tiga jilid) dan *Handasat at-Turbah* (Teknik Pertanian) (1 juz), ia juga menghasilkan empat buah buku tebal dalam kajian keislaman, yakni *al-Kitab wa al Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (1990), *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi ad-Dawlah wa al 'Mujtama'* (1994), *al-Islam wa al-lman: Manzhumah Qiyam* (1996), dan *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (2000). Keempat buku tersebut dipandang oleh banyak kalangan sebagai hasil kerja yang kontroversial. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai telur ayam jantan (*baydhah ad'dik*) yang walaupun telur tapi tidak berguna karena tidak bisa menetas. Alasan tuduhan mereka adalah karena karya-karya itu bukan dihasilkan oleh orang yang kapabel di bidangnya.³⁷

Shahrur tergolong pemikir yang gigih. Ia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditujukan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat orisinal dan berani. Saat ini ia tengah menjadi obyek kritikan di dunia Arab. Sekitar 15 buku ditulis untuk menyerang pemikirannya, antara lain *Nahw Fiqh Jadid*, *Mujarrad Tanjim*, *Tahafut al 'Qira'ah al-Mu'ashirah*, dan *an-Nash, as Sulthah, al-Haqiqah*. Dalam berbagai kesempatan, ia dituduh oleh para syekh dan ulama sebagai seorang murtad, kafir, setan, komunis, dan berbagai macam sebutan buruk lainnya. Bahkan ia pernah dituduh sebagai musuh Islam dan agen Barat serta seorang Zionis. Teror semacam itu masih ditambah lagi dengan adanya larangan secara resmi beredarnya buku-buku Shahrur dari sebagian

³⁷ Muhammad Sharur, *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*, Terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, "Tirani Islami: Genealogi Masyarakat dan Negara ", Yogyakarta: LKiS, 1994, hlm. v - viii

pemerintah negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, terutama buku keduanya (*Dirasah Islamiyyah Muashirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama*, 1994) dan buku ketiganya (*al-Islam wa al-Iman: Manzhumah al-Qiyam*), 1996).

Semua kajian dan konsepsi barunya itu merupakan upaya Shahrur untuk menanggulangi krisis multi dimensi yang menggelayuti dunia Muslim saat ini. Pertanyaan yang selalu muncul di benak Shahrur adalah manakah bukti kebenaran risalah Muhammad sebagai risalah penutup dalam realitas dunia nyata saat ini? Mungkinkah risalah penutup ini menghasilkan umat yang lemah dan tak berdaya seperti sekarang? Itulah yang selalu mendorong Shahrur untuk meneruskan kajian kajiannya.³⁸

B. Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar

Muhammad Shahrur pemikir liberal asal Syria berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau Tuhan meletakkannya pada awal surat al-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia.

Seperti yang terlihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam *al-Tanzil* yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqih, seperti biasanya, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada

³⁸ Muhammad Shahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, Terj. M. Zaid Su'di, "Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok", *op. cit*, hlm. xiii - xv.

di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.³⁹

Selanjutnya menurut Muhammad Shahrur sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa yang menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan mahar, Muhammad Shahrur menyatakan, sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut, maka Allah memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin dan mahar pada saat mengawininya dengan maksud mencari ridla Allah dengan mengawini mereka dan nantinya akan mengasuh anak-anak yatim tersebut, seperti dalam firman-Nya:



³⁹ Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Elsaq Press, 2004, hlm. 425

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 428

Menurut Muhammad Shahrur, sebagaimana diketahui, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat tidak memperoleh waris. Namun demikian, ayat di atas beserta perannya tidaklah dihasilkan dari pemahaman yang dangkal dan sama sekali tidak terkait dengan ayat 3 dan 4 di atas dalam surat yang sama, meskipun isyarat tentangnya sangatlah jelas dalam firman-Nya: "Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil."

⁴¹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 143

mausulnya (yang disifati) sehingga berarti: perempuan-perempuan yang yatim, dan makna ini berbeda dengan makna pertama di atas. Kata *annisa* adalah bentuk plural dari kata *imra'ah*, dan *al-mar'ah* adalah perempuan yang sudah mencapai usia nikah, dan sifat yatim hilang secara hukum bersamaan dengan sampainya usia nikah, berdasarkan atas firman Allah: "Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...." (Qs. al-Nisa': 6).

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Muhammad Shahrur tidak ada *nisa yatimat* (perempuan-perempuan yatim), karena kalau tidak demikian, maka akan ada juga *rijal aytam* (laki-laki yatim). Hal ini tidak mungkin menurut logika. Yang terpenting dari kesemuanya adalah bahwa ayat di atas memaafkan untuk tidak memberikan maskawin, mahar, dan waris.⁴²

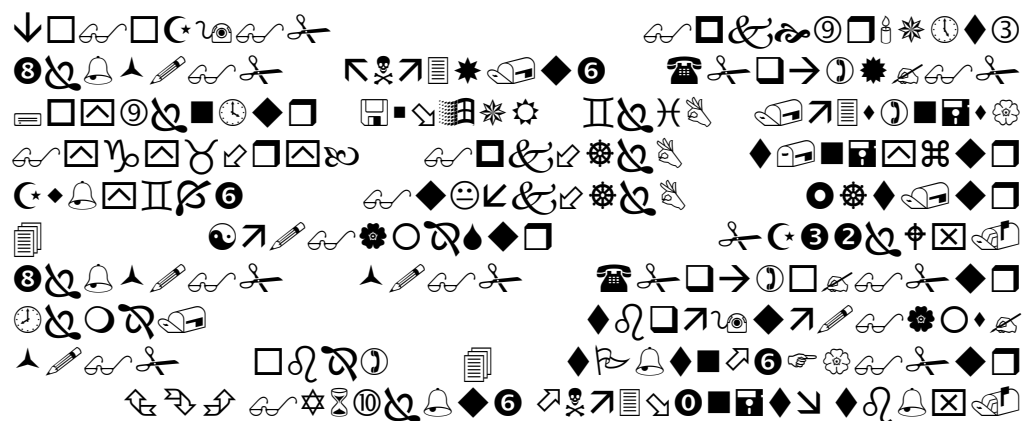
C. Istinbath Hukum Muhammad Shahrur

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt., sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkannya pada awal surat al-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia. Seperti yang terlihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam *al-Tanzil* yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqih, seperti biasanya, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.⁴³

⁴² *Ibid*

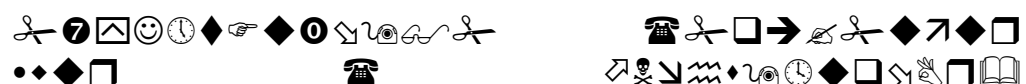
⁴³ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Elsaq Press, Yogyakarta, 2004, hlm., hlm. 425

Jika diperhatikan, Allah Swt, mengawali surat al-Nisa' dengan seruan kepada manusia agar bertakwa kepada Tuhan yang juga merupakan tema penutup dari surat Ali-Imran sebelumnya, serta seruan kepada mereka untuk menyambung tali silaturrahim dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal, bukan pandangan kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai isyarat bahwa penciptaan manusia berasal dari *nafs* yang sama (*nafs wahidah*). Allah berfirman:



Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya agar kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. al-Nisa': 1).

Kemudian Allah Swt beralih kepada pembicaraan tentang anak-anak yatim. Dalam konteks ini, Dia memerintahkan kepada manusia agar memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Allah berfirman:

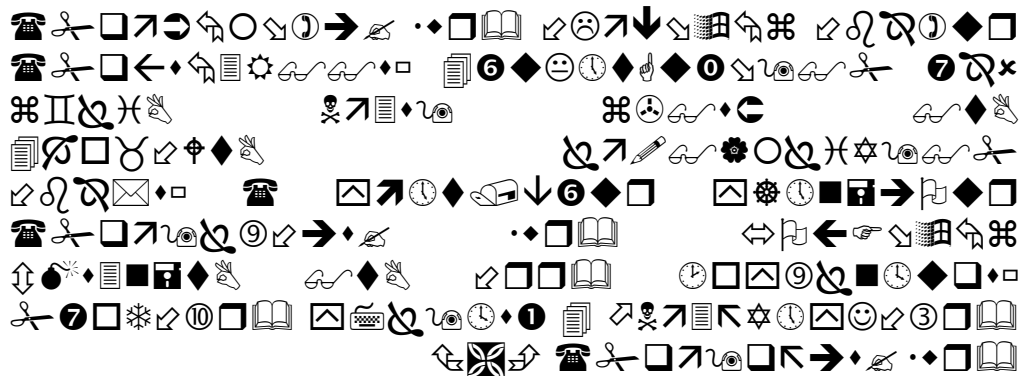




Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar" (QS. al-Nisa': 2).

Selanjutnya, Allah Swt menindak lanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.

Allah berfirman:

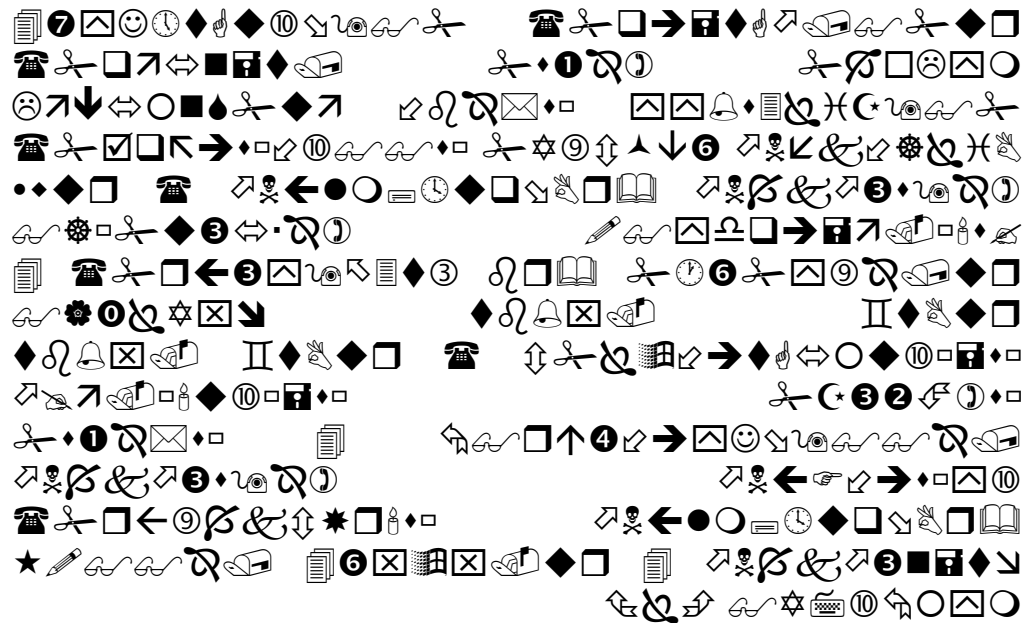


Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS. al-Nisa': 3).

Kemudian pada ayat keempat, Allah Swt melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan mahar bagi perempuan, dan pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akal nya harta benda mereka, kemudian pada ayat keenam sekali lagi

Allah membicarakan anak-anak yatim. Allah Swt berfirman:

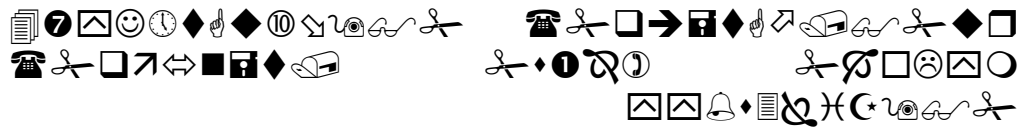


Artinya: "Dan ujilah (baca: didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (bisa mengelola harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa" (QS. al-Nisa': 6).

Dengan demikian merupakan keharusan bagi para peneliti yang bermaksud membahas masalah poligami dalam *at-Tanzil al-Hakim* untuk memperhatikan ayat-ayat di atas secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat tersebut dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

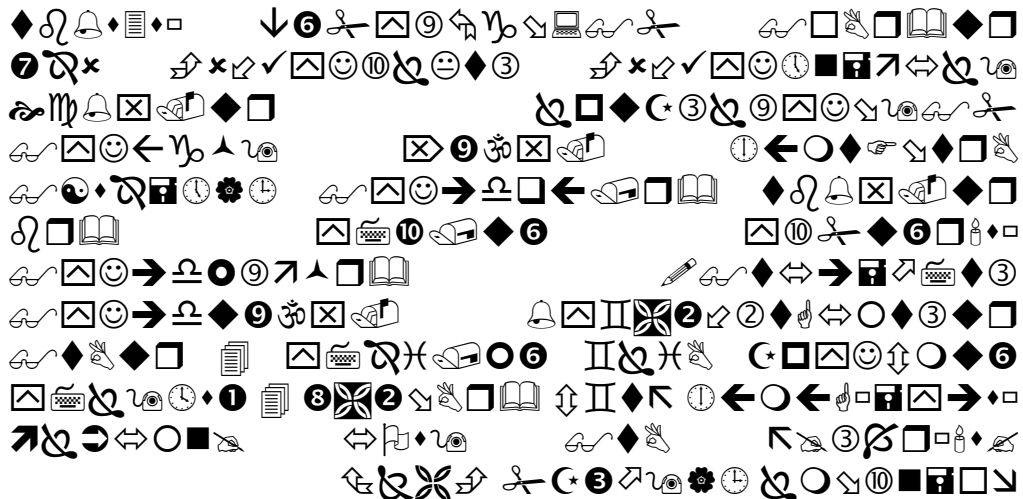
Kata *al-yatim* dalam bahasa Arab dan *at-Tanzil al-Hakim* berarti seorang anak yang belum mencapai umur balig yang telah kehilangan

ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian *al-yatim* seperti ini ada dalam firman Allah:



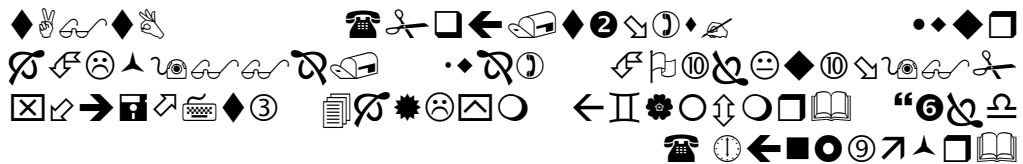
Artinya: "Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin" (QS. al-Nisa':6).

Sedangkan kata *al-yatim* yang berarti "seorang anak yang telah kehilangan ayahnya" disebutkan juga secara jelas dalam firman-Nya:



Artinya: "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta tanda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh..." (QS. al-Kahfi : 82).

Demikian juga, kata tersebut disebutkan secara tersirat dalam firman- Nya:



Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat" (QS. al-An'am: 152),

Kesemuanya memperkuat bahwa pokok bahasan ayat-ayat di atas adalah berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara

ibu mereka masih hidup menjanda. Apabila seseorang bertanya: Bagaimana halnya dengan anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim piatu) atau anak yang kehilangan ibunya? Menurut Muhammad Shahrur, dengan kematian kedua orang tua, maka gugurlah masalah poligami. Demikian juga halnya dengan kematian seorang ibu, sementara sang suami masih hidup, sehingga seandainya sang suami menikah lagi dengan perempuan yang lain, maka isteri keduanya tersebut tidak termasuk dalam kategori poligami sebagaimana yang dijelaskan ayat-ayat di atas.⁴⁴

Di sini, orang berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya, di mana Allah menghendaki dan memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak umur dewasa. Bagaimana hal tersebut bisa terwujud? Apakah akan mengambil anak-anak yatim tersebut dalam asuhan ibu mereka ke rumah kita, dan mendidik mereka dengan memisahkannya dari ibu-ibu mereka? Apakah membiarkan mereka di rumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup kepada mereka sendiri? Hal tersebut memang seakan-akan mungkin! Akan tetapi, tetap ada kenyataan lain, bahwa kita tidak dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik.⁴⁵

Dalam keadaan ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan pada anak-anak yatim sesuai dengan yang dimaksud (sebagaimana firman

⁴⁴ Muhamammad Sharur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", *op. cit*, hlm. xii

⁴⁵ *Ibid*, hlm. Xiv

Allah: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..."), maka ayat di atas memperbolehkan poligami, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman: "... maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...."). *Khitab* (perintah) dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua, dan diakhiri dengan empat (dua, tiga, atau empat).⁴⁶

Sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan Muhammad Shahrur di atas adalah berdasarkan pada "struktur kaidah bahasa" dalam firman-Nya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat."

Secara cermat firman Allah: *mataba lakum* (perempuan-perempuan yang kamu senangi). Bahkan berkenaan dengan seorang janda yang memiliki anak-anak yatim yang telah kehilangan pemimpin dan penopang keluarganya,

⁴⁶ *Ibid*

sehingga ia dengan sangat terpaksa menerima setiap pinangan yang ditujukan kepadanya. Menurut Muhammad Shahrur, Allah menggunakan kata-kata dengan sangat halus dan penuh perasaan ketika menyebutkan seorang janda sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya dan menjaga perasaannya, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap persoalan perkawinan, padahal bagi Allah, dalam keadaan keterpaksaan yang demikian, boleh-boleh saja. Allah berfirman: *fankihu ma shi'tum min al-Nisa'* (maka kawinilah wanita-wanita yang kamu kehendaki). Akan tetapi, Allah berfirman: *fankihu mataba lakum min al-Nisa'* (maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi). Di sini sangat jelas perbedaan antara lafazh *taba* dan *shaa*, Maha Suci Allah, Dialah Hakim yang seadil-adilnya.⁴⁷

Akan tetapi, perhatian manusiawi terhadap ayat tersebut sering kali menimbulkan antusiasme yang menggebu-gebu dalam hati seseorang, sehingga ia berlebihan dalam upaya mendapatkan keridlaan Allah, padahal ia tidak memiliki biaya untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya yang pertama, ditambah dengan tanggungan-tanggungan tambahan dari isteri kedua beserta anak-anak yatimnya, lalu ia terjatuh ke dalam belenggu kesulitan. Maka pembagian seseorang antara perhatian terhadap anak-anaknya dan kewajibannya terhadap anak-anak yatim telah menyebabkan bersikap tidak adil di antara mereka. Penjelasan akan hal ini terdapat dalam firman-Nya: "Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih

⁴⁷ Muhammad Shahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, Terj. M. Zaid Su'di, "Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok", *op. cit*, hlm. xiii - xv.

efektif mengantisipasi tindak aniaya". Di sini datang perintah Tuhan untuk tidak berpoligami dan mencukupkan dengan seorang isteri saja ketika dalam keadaan takut akan terbelit belenggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.⁴⁸

Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah: *fa in khiftum an la ta'dilu* berarti: tidak berbuat adil di antara para isteri dalam hubungan suami isteri (senggama). Menurut Muhammad Shahrur pendapat ini tidaklah tepat, karena konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis (senggama), dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya. Karena Allah dalam perintah-Nya agar seseorang mencukupkan diri dengan seorang isteri saja berangkat dari pertimbangan yang jelas, yaitu: "yang demikian itu adalah lebih efektif mengantisipasi tindak aniaya," artinya bahwa dengan mencukupkan diri seorang isteri saja dapat menjauhkan kalian dari belenggu kesulitan dan dari tindakan tidak adil.⁴⁹

Sesungguhnya perintah berpoligami (berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas) akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain: (1) Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji (2)

⁴⁸ Muhamammad Sharur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", *op. cit*, hlm, hlm. xiii

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 427

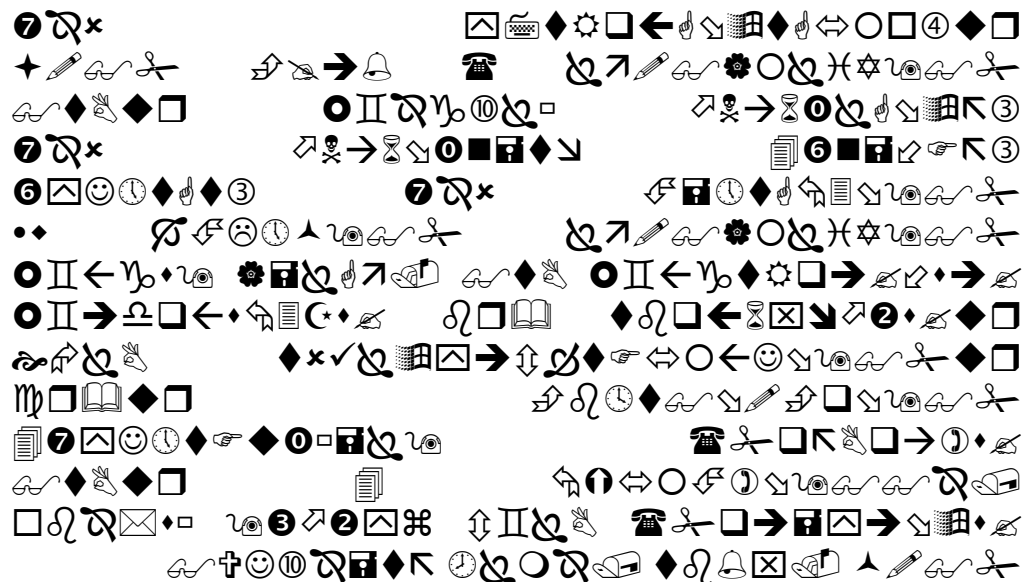
Pelipatgandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya (3) Keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka. Hal tersebut dapat menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. Beberapa lembaga penampungan anak-anak yatim memang telah memenuhi sebagian tempat tinggal bagi mereka, namun hal itu dapat menjauhkan dan memisahkan mereka dari ibu-ibu kandung mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan akan pentingnya lembaga dan yayasan-yayasan dalam masyarakat yang menampung anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan kedua orang tuanya atau anak-anak terlantar, dan di sinilah letak peran dan tujuan dari adopsi.⁵⁰

Allah memerintahkan agar berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dalam kaitan tersebutlah, Allah memerintahkan poligami dengan syarat tidak terdapat rasa khawatir akan berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim. Kemudian Allah kembali memperingatkan agar waspada terjatuh dalam kelemahan dan kesulitan dan memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan seorang isteri saja dalam keadaan demikian. Sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut, maka Dia memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin dan mahar pada saat mengawininya dengan maksud mencari ridla Allah dengan

⁵⁰ Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", *op. cit*, hlm. xv

mengawini mereka dan mengasuh anak-anak yatimnya, seperti dalam firman-

Nya:

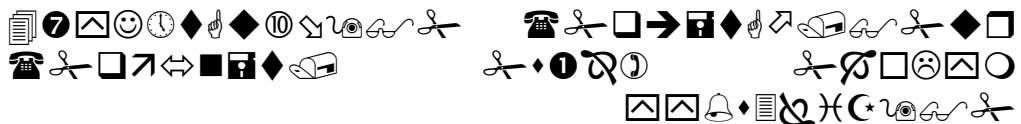


Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al Kitab (juga memfatwakan) tentang perempuan-perempuan yang memiliki anak-anak yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya'(QS.al-Nisa'[4]:127).

Sebagaimana diketahui, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat tidak memperoleh waris. Namun demikian, ayat di atas beserta perannya tidaklah dihasilkan dari pemahaman yang dangkal dan sama sekali tidak terkait dengan ayat 3 dan 4 di atas dalam surat yang sama, meskipun isyarat tentangnya sangatlah jelas dalam firman-Nya: "Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil."⁵¹

⁵¹ al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 3 – 4

Sebagian orang berpendapat bahwa firman-Nya: "*yatama al-nisa'i*" dalam ayat 127 di atas berarti perempuan-perempuan yatim. Pendapat demikian ini, menurut Muhammad Shahrur, tidak berarti sedikit pun, karena hubungan kebahasaan di antara kata: *yatama* dan *al-nisa* di dalam firman tersebut adalah hubungan *mudaf* dan *mudaf'ilayh*. Ini berarti bahwa anak-anak yatim dari atau milik perempuan-perempuan. Sedangkan hubungan bahasa di antara kedua kata tersebut dalam pendapat sebagian orang: *al-Nisa al-yaumat* adalah hubungan *sifah* (sifat) dan *mausulnya* (yang disifati) sehingga berarti: perempuan-perempuan yang yatim, dan makna ini berbeda dengan makna pertama di atas. Kata *al-nisa* adalah bentuk plural dari kata *imra'ah*, dan *almar'ah* adalah perempuan yang sudah mencapai usia nikah, dan sifat yatim hilang secara hukum bersamaan dengan sampainya usia nikah, berdasarkan atas firman Allah:



Artinya: "Dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...." (QS. al-Nisa': 6).⁵²

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada *nisa yatimat* (perempuan-perempuan yatim), karena kalau tidak demikian, maka akan ada juga *rijal yatam* (laki-laki yatim). Hal ini tidak mungkin menurut logika. Yang terpenting dari kesemuanya adalah bahwa ayat di atas memaafkan untuk tidak memberikan maskawin, mahar, dan waris.

⁵² Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115 – 116

Sebagian mufassir, seperti al-Suyuti, berpendapat bahwa firman Allah: "Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka,, " yakni Allah memberikan fatwa kepadamu tentang hukum waris bagi perempuan dalam *at-Tanzil* dan tentang waris dan mahar bagi perempuan-perempuan yatim. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil kepada anak-anak yatim, kemudian dia memperbolehkan untuk tidak memberikan mahar (kepada perempuan-perempuan yatim tersebut) ketika seseorang ingin menikahi mereka? Dan apakah yang demikian itu merupakan kebaikan dan keadilan? Tidak cukupkah perempuan-perempuan yatim tersebut dengan kegetiran karena yatim, sampai-sampai Allah membebaninya dengan kegetiran lain, yakni tidak mendapatkan mahar? Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.⁵³

Muhammad Shahrur melihat masalah poligami (sebagai perintah Tuhan yang ditetapkan dengan persyaratan-persyaratan, seperti yang telah kami jelaskan di atas) sebagai jalan keluar bagi persoalan kemasyarakatan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, berdasarkan firman-Nya: *wa in khiftum...* (dan jika kamu khawatir...). Muhammad Shahrur berpendapat bahwa manusia harus melaksanakan perintah tersebut tatkala telah terjadi problem dan sebaliknya seharusnya meninggalkannya ketika tidak terjadi problem. Problem itu terkait erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dan

⁵³ Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", *op. cit.*, hlm. 426-427

kebudayaan masyarakat bersangkutan. Poligami adalah fenomena umum yang diterima oleh banyak suku bangsa tanpa adanya batas dan persyaratan.⁵⁴

Dari sini Muhammad Shahrur berpendapat bahwa masyarakatlah yang menetapkan pemberlakuan poligami ataupun melarangnya, sebab dalam pemberlakuannya harus memperhatikan ada dan tidaknya syarat-syarat poligami seperti yang disebutkan dalam *at-Tanzil al-Hakim* di atas. Akan tetapi, dalam kedua keadaan tersebut masyarakat haruslah tetap berpegang pada statistik dan pendapat-pendapat para ahli, lalu meminta pertimbangan mereka untuk menetapkan poligami atau meninggalkannya. Apabila ditetapkan pemberlakuannya di negara Syria, misalnya, maka pemberlakuan tersebut benar adanya, dan apabila tidak memberlakukannya, seperti di Negara Saudi, misalnya, juga benar. Dalam dua keadaan tersebut, keduanya bukanlah merupakan ketetapan yang berlaku abadi. Problema dalam fiqih Islam ialah bahwa dalam masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan halal dan haram, pendapat masyarakat tidak diperhatikan sedikit pun, dan pembicaraan tentang pengkalkulasian dan *polling* pendapat sangatlah jarang ditemui dalam pikiran para ahli fiqih, karena mereka bertolak dari tesis (premis pokok) menurut mereka, yakni kekuasaan hukum hanya pada Allah dan mereka beserta hukum-hukum dan fiqihnya adalah merupakan gambaran dari kekuasaan tersebut di muka bumi, di mana manusia dan pandangan-pandangan mereka tidak memiliki peran sedikit pun di sampingnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 429

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 431

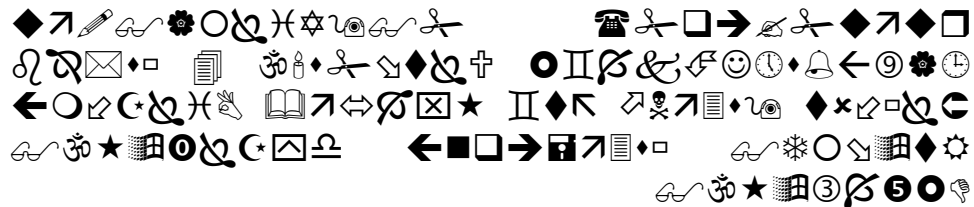
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN POLIGAMI

A. Mahar

1. Pengertian Mahar dan Landasan Hukumnya

Kata mahar dalam al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata saduqah, yaitu dalam surat an-Nisa':4



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kami sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa' :4).⁵⁶

Menurut Imam Taqiyuddin Abubakar, mahar (*shadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *shadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dan di dalam sunnah disebut *mahar, 'aliqah dan 'aqar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-memerelakan *taradhi*.⁵⁷

⁵⁶ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 115

⁵⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 2, hlm. 60

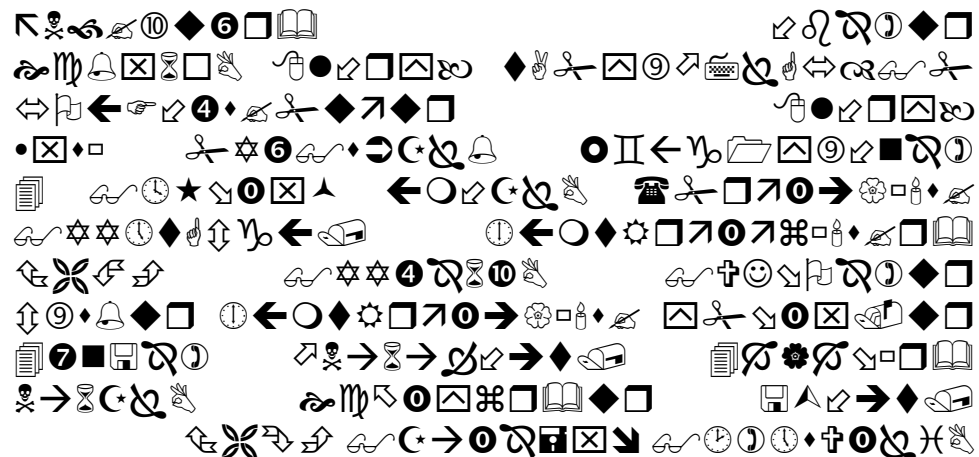
Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, mahar/maskawin adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahar mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.⁵⁸ Sedangkan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary menegaskan, mahar ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*shidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Shidaq* dinamakan juga dengan "*Mahar*."⁵⁹

Menurut Ahmad al-Syarbashi, mahar adalah hak yang wajib untuk istri. Mahar adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai. Dalilnya adalah firman Allah Swt di dalam surah An-Nisa, "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian dari mahar itu kepadamu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S. an-Nisa': 4).

⁵⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV. Asy Sifa', tth, hlm. 373

⁵⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 88

Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah an-Nisa,



Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dusta yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan (istri-istri kamu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu." (QS. an-Nisa': 20- 21).⁶⁰

Mahar tidak mempunyai batas minimal dan tidak juga mempunyai batas maksimal. Mahar dapat berupa sejumlah uang yang banyak,⁶¹ dengan bersandar kepada firman Allah Swt,

"Sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak." (QS. an-Nisa': 20).⁶²

⁶⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 119-120

⁶¹ Ahmad al-Syarbashi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 228-229

⁶² Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 119

Dari keterangan di atas, Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi menyatakan, disunnahkan untuk menyebutkan Mahar (maskawin) di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (tuan) dengan Amatnya.⁶³ Imam Malik, dalam kitabnya menegaskan: Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan maskawin kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan karena pencurian."⁶⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.⁶⁵

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta

⁶³ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 42-43

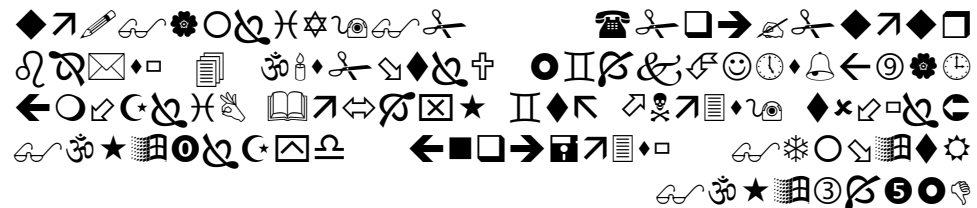
⁶⁴ Imam Malik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 282

⁶⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 105

bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).⁶⁶

Landasan hukum mahar adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kami sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa' :4)⁶⁷

2. Sabda Rasulullah Saw, yang artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak

⁶⁶ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa*, Terj. Abdul Ghofur, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996, hlm. 411

⁶⁷ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 115

berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)⁶⁸

2. Macam-Macam Mahar

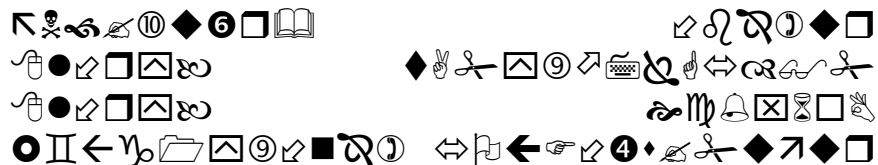
Mahar merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.⁶⁹ Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.⁷⁰ Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. berfirman:



⁶⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Juz. 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255

⁶⁹ Zakiah Daradjat, *et .al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 83

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 55.



Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun." (QS.al- Nisa:20)

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain " pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman.



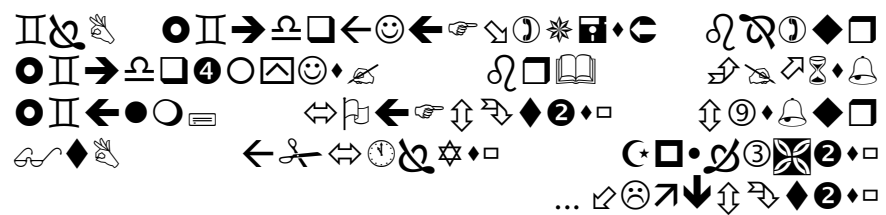
Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. al-Nisa: 21)

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram*

sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang berbunyi:



Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu " (Q.S.al-Baqarah:237)

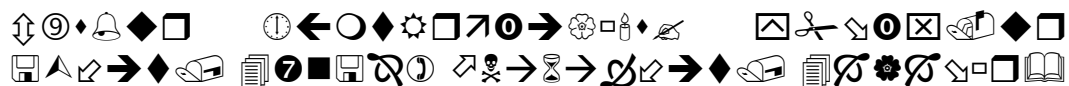
Kemudian dalam *hal khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar mahar yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada

halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka.⁷¹

Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separoh mahar, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih Juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar mahar seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.⁷²

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur'an dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa maharnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun,⁷³ yakni firman Allah Swt.:



Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. (Q.S. al-Nisa: 21)

⁷¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit*, hlm. 118

⁷² *Ibid*

⁷³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1990, hlm. 80 - 86

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.⁷⁴ Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁷⁵

Dalam hal ini, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, maka nikahnya disebut nikah *tafwid* (نكاح التفويض).

Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt.:

Artinya: Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya...(Q.S.al-Baqarah:236)

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55

⁷⁵ Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, hlm. 32 - 34

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama: jika istri menuntut penentuan mahar, sedangkan kedua suami istri mempersengketakannya.

Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah istri berhak menerima atau tidak?

1. Jika Istri Menuntut Penentuan Mahar

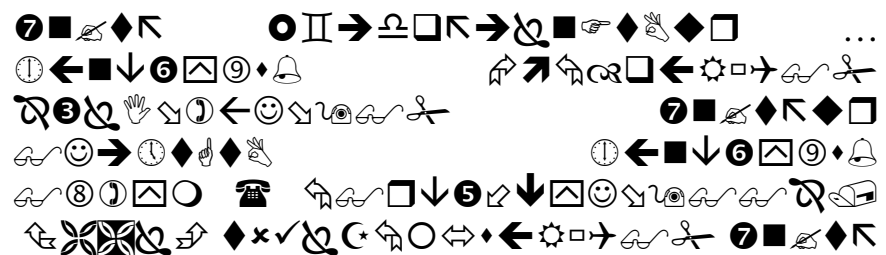
Apabila istri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan fuqaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar *mitsil*. Akan tetapi jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar, maka segolongan fuqaha mengatakan bahwa istri memperoleh separoh mahar. Segolongan lainnya mengatakan bahwa istri tidak memperoleh suatu apapun, karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu dari tiga hal, yaitu: ia boleh menceraikan istrinya tanpa menentukan mahar, atau menentukan jumlah mahar sebagaimana yang dituntut oleh istri, atau menentukan mahar *mitsil*

dan istri harus mau menerimanya. Perbedaan pendapat antara fuqaha yang mewajibkan mahar *mitsil* atas suami tanpa memberikan pilihan, jika ia menceraikan istrinya sesudah menentukan mahar dengan pendapat fuqaha yang tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam memahami *mafhum* dari Surat al-Baqarah: 236 di atas.

Perbedaan tersebut apakah ayat itu diartikan dengan keumuman terhapusnya mahar, baik talak tersebut karena persengketaan antara suami istri tentang penentuan mahar, ataupun talak tersebut disebabkan bukan oleh persengketaan. Demikian pula, apakah dari peniadaan halangan (dosa) itu dapat dipahamkan hapusnya sama sekali, atau tidak dapat dipahamkan demikian.

Ayat tersebut memberikan kemungkinan bahwa yang lebih jelas adalah kemungkinan terhapusnya mahar sama sekali, berdasarkan firman Allah Swt.:



Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. al-Baqarah: 236)

Bagi fuqaha yang mewajibkan pemberian harta sebagai kesenangan (*mut'ah*) dan setengah mahar bagi istri, jika suami menceraikan istri sebelum menggaulinya pada selain nikah *tafwid*, juga mewajibkan mahar *mitsil* pada nikah *tafw'id*, maka sudah seharusnya fuqaha tersebut juga mewajibkan separoh mahar *mitsil mut'ah* pada nikah *tafwid*. Hal itu karena mafhumnya, ayat tersebut tidak menyebut-nyebut masalah penghapusan mahar pada nikah *tafwid*, melainkan hanya membicarakan kebolehan menceraikan sebelum menentukan mahar dan jika nikah *tafwid* mewajibkan adanya mahar *mitsil*. Jika mahar itu dituntut, maka seharusnya pula jika terjadi perceraian, mahar tersebut juga harus diberikan separoh sebagaimana mahar yang telah ditentukan juga harus separoh. Itulah sebabnya, Imam Malik berpendapat bahwa pada nikah *tafwid* tidak diwajibkan mahar *mitsil*, jika pada suami terdapat hak memilih.⁷⁶

2. Jika Suami Meninggal Dunia Sebelum Menentukan Mahar

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar, dan belum menggauli istrinya, maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta al-Auza'li berpendapat bahwa, istri tidak memperoleh mahar, tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, istri memperoleh mahar *mitsil* dan warisan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad

⁷⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 122

dan Abu Dawud. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Tetapi yang dijadikan pegangan di kalangan pengikutnya adalah pendapat Imam Malik.

3. Gugurnya Kewajiban Membayar Mahar

Mahar menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar mahar sepenuhnya, apabila terjadi perceraian di antara suami isteri sebelum bersetubuh, sedangkan perceraian itu disebabkan oleh:

- a. Permintaan dari isteri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- b. Permintaan dari suami karena pada isteri terdapat cacat badan, atau isteri keluar dari Islam, kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
- c. Suami menthalak isterinya sebelum terjadi bersetubuh, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar sejumlah mahar, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut'ah (pemberian untuk menggembirakan isteri).⁷⁷

Maskawin menjadi gugur separuhnya sehingga hanya seperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak

⁷⁷ Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 43-44

oleh suami sebelum bersetubuh sedangkan mahar telah ditetapkan jumlahnya.⁷⁸

Rusaknya mahar bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar, babi, dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki, sedangkan mahar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

- a. Barangnya tidak boleh dimiliki.
- b. Mahar digabungkan dengan jual beli.
- c. Penggabungan mahar dengan pemberian.
- d. Cacat pada mahar.
- e. Persyaratan dalam mahar.⁷⁹

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti: khamar, babi, dan buah yang belum masak atau unta yang lepas, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah apabila telah memenuhi mahar *mitsil*. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini. *Pertama*, mengatakan bahwa akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (*fasakh*), baik sebelum maupun sesudah *dukhul*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid. *Kedua*,

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 44

⁷⁹ Mu'amal Hamidy, *op. cit*, hlm. 34

mengatakan bahwa apabila telah *dukhul*, maka akad nikah menjadi tetap, dan istri memperoleh mahar *mitsil*.⁸⁰

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli, ulama fiqh berbeda pendapat seperti: jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki memberikan seribu dirham untuk membayar hamba dan sebagai mahar, tanpa menyebutkan mana yang harga dan mana yang sebagai mahar, maka Imam Malik dan Ibnul Qasim melarangnya, seperti juga Abu Saur. Akan tetapi, Asyhab dan Imam Abu Hanifah membolehkan, sedangkan Abu Ilah mengadakan pemisahan dengan mengatakan bahwa apabila dari jual beli tersebut masih terdapat kelebihan sebesar seperempat dinar ke atas, maka cara seperti itu dibolehkan.⁸¹

Tentang penggabungan mahar dengan' pemberian, ulama juga berselisih pendapat, misalnya dalam hal seseorang yang menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikannya terdapat pemberian untuk ayahnya (perempuan itu). Perselisihan itu terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan maharnya pun sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu rusak, dan istrinya

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit*, hlm. 124

memperoleh mahar *mitsil*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila syarat itu dikemukakan ketika akad nikah, maka pemberian itu menjadi milik pihak perempuan. Sedangkan apabila syarat itu dikemukakan setelah akad nikah, maka pemberiannya menjadi milik ayah.⁸²

Mengenai cacat yang terdapat pada mahar, ulama fikih juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa, akad nikah tetap terjadi. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal apakah harus diganti dengan harganya, atau dengan barang yang seimbang, atau juga dengan mahar *mitsil*.

Imam Syafi'I terkadang menetapkan harganya dan terkadang menetapkan mahar *mitsil*. Imam Malik dalam satu pendapat menetapkan bahwa harus meminta harganya, dan pendapat lain diminta barang yang sebanding. Sedangkan Abu Hasan al-Lakhami berkata, "jika dikatakan, diminta harga terendahnya atau mahar *mitsil* tentu lebih tepat."⁸³

Terhadap persyaratan dalam mahar seperti seorang lelaki yang menikahi wanita dengan memberikan persyaratan bahwa apabila ia tidak mempunyai istri lain, maka maharnya adalah 2000 dirham. Jumhur fuqaha membolehkannya, tetapi berselisih pendapat tentang kadar mahar yang wajib. Sebagian fuqaha

⁸² Ibid.

⁸³ Mu'amal Hamidy, op. cit, hlm 35

berpendapat bahwa syarat seperti itu dibolehkan dan istri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan.

Fuqaha lainnya berpendapat bahwa istri memperoleh mahar *mitsil*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, juga Abu Saur. Hanya saja Abu Saur berpendapat bahwa apabila suami menceraikannya sebelum dukhul, maka istrinya hanya memperoleh mut'ah.. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila suami mempunyai istri lain, maka istri memperoleh seribu dirham. Tetapi jika tidak mempunyai istri lain, maka memperoleh mahar *mitsil*, selama tidak lebih dari dua ribu dirham atau tidak kurang dari seribu dirham.⁸⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat *difasakh* karena adanya ketidakjelasan, seperti halnya jual beli.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajiban untuk membayar mahar seluruhnya, apabila perceraian sebelum persetubuhan yang datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau memfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.⁸⁵

⁸⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit*, hlm. 126

⁸⁵ Mu'ammal Hamidy, *op. cit*, hlm. 38

Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedang mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.⁸⁶

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, poligami (Ar.: *ta'addud az-zaujat* = berbilangnya istri). Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang jumlah istrinya banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁸⁷

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁸⁸ WJS. Poerwadarminta

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 107

⁸⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 885

mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁸⁹ Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁹⁰

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam*.⁹¹ Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan poligami adalah beristri lebih dari satu.⁹²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi

⁸⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

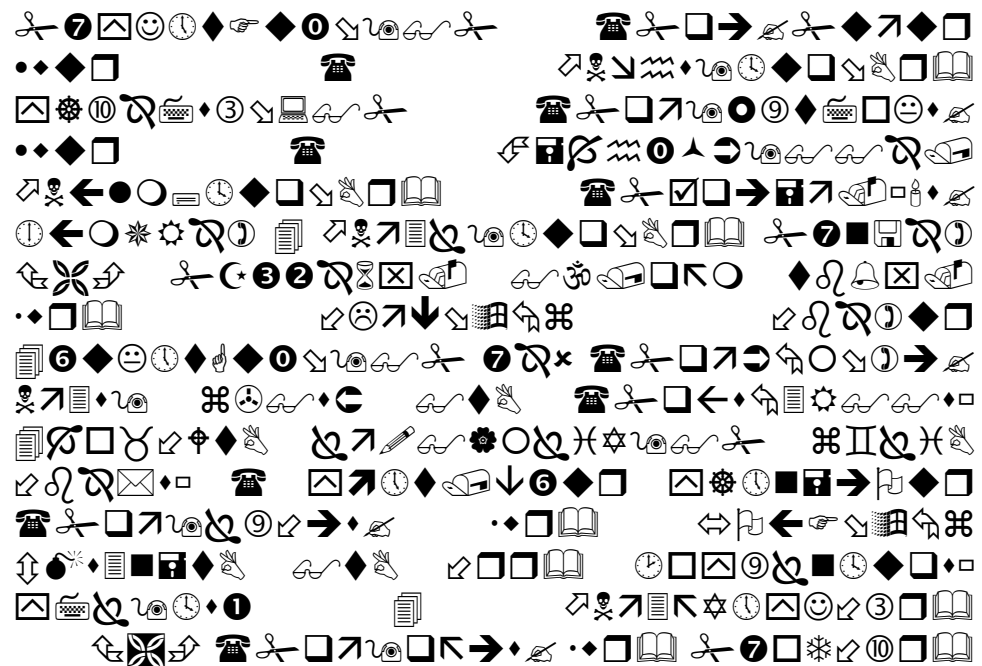
⁹⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 606

⁹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43.

⁹² Moch. Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 149

Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah Swt:



Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampuradukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS al-Nisa' (4): 2-3).⁹³

⁹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 114 – 115

Dan dijelaskan juga dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 129:



Artinya: Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Nisa': 129).⁹⁴

Menurut penafsiran Ibnu Kasir bahwa ayat di atas menunjukkan:

Apabila di bawah asuhan seseorang terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak; Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya.⁹⁵

Dalam satu Hadits shahih yang lain pula disebutkan riwayat dari Aisyah.

Dia berkata:

"Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 143

⁹⁵ Al-Imam al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth, hlm. 433

mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka datanglah ayat ini: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Maksudnya: "Ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu." Ada pula riwayat lain yang shahih yang ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu: "Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya." Kata Aisyah: "Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi, harta anak itu diserikatnya sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahinya sendiri tidak, diserahkannya supaya dinikahi orang lainpun tidak. Setelah menilik ketiga riwayat yang shahih dari Aisyah ini, maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.⁹⁶

Ayat 2 dan 3 Surat al-Nisa di atas berkaitan (ada relevansinya), sebab ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 433 – 434

yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil serta fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 Surat Al-Nisa tersebut.⁹⁷

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama surat ini Surat al-Nisa', maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya, agar ia tidak berbuat zalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut Aisyah ra, yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini adalah dalam kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. Kemudian ada pendapat lain lagi, ialah Al-Razi, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini

⁹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz 4, Kairo: al-Manar, 1367 H, hlm. 344-345

ialah larangan berpoligami yang mendorong orang yang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.⁹⁸

2. Sejarah Poligami

Di antara semua daratan yang luasnya sebanding dengan Semenanjung Arab, dan di antara semua bangsa yang kepentingan dan makna historisnya sejajar atau mendekati bangsa Arab, hanya bangsa Arab yang luput dari perhatian dan kajian serius di masa modern ini. Meski luas Semenanjung Arab mencapai kurang lebih seperempat wilayah Eropa, atau sepertiga wilayah Amerika, namun yang kita ketahui tentang belahan dunia ini benar-benar di luar proporsi yang seharusnya. Kita bahkan mengetahui lebih banyak tentang wilayah Artik dan Antartika daripada wilayah Arab.⁹⁹ Untuk itu ada baiknya melihat poligami tanpa mengabaikan aspek historis bangsa Arab.

Pada masa pra Islam, belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawin. Belum ada batas, patokan, ikatan, dan syarat. Maka seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sehingga diriwayatkan

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Philip K Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 13

dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai tujuh ratus orang istri serta tiga ratus orang gundik.¹⁰⁰

Bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Di masa sekarang, poligami berwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyarakat Arab sebelum Islam tidak dikenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum lelaki tidak pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak senang dengan perkawinan itu.¹⁰¹

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut, ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah.¹⁰²

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 683

¹⁰¹ Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 12

¹⁰² Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1983, hlm. 223

Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas.

Beberapa riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Ada riwayatnya menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, yakni QS al-Nisa': [4]:3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat, agar menceraikan istri-istrinya, sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.¹⁰³ Karena itu, al-Aqqad, ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat.¹⁰⁴

3. Syarat Poligami

Hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

¹⁰³ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, *al-Jami al-Shalih*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 445

¹⁰⁴ Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Arabi, tth, 107

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnia tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang saleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹⁰⁵

Allah Ta'ala membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haramlah baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya kawin dengan tiga perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan

¹⁰⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Mesir: Dar al-Manar, 1374 H, hlm. 364-370

berbuat zalim kalau kawin dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.¹⁰⁶

Struktur keluarga dalam Islam tidak bisa dikatakan mengandung watak poligami. Sifat keluarga yang lebih disukai adalah monogami. Tapi, poligami juga tidak sepenuhnya ditolak. Masih ada hal-hal yang membolehkannya. Masalahnya amat tergantung pada kebijaksanaan dan kesadaran seseorang. Tapi juga lantaran adanya kondisi sosial tertentu. Tak ada aturan dalam Islam yang menunjukkan bahwa poligami harus dilaksanakan atau dilarang sama sekali. Jika poligami itu terjadi, haruslah ada rasa saling berharap di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Inilah yang menjadi intisari dari pandangan Islam. Terutama dalam pembentukan segi-segi sosial dan perubahan sikap sosial masyarakat. Islam sering melihat praktek-praktek poligami dalam kenyataan. Tidak ada kesimpulan yang jelas, bagaimana hal itu bisa terjadi. Islam akhirnya membolehkan praktek itu tetap terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak menolaknya begitu saja, meniadakan atau menganjurkannya.¹⁰⁷

Dengan memperhatikan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami itu dibolehkan namun pada dasarnya, hukum Islam menganut asas monogami. Poligami diperkenankan hanya dalam keadaan yang memungkinkan dengan memenuhi sejumlah syarat. Adapun syarat poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Undang Nomor 1/1974 Tentang

¹⁰⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 186

¹⁰⁷ Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 41

Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR

A. Analisis Pendapat Muhammad Shahrur tentang Poligami dengan Janda Tanpa Mahar

Dalam al-Qur'an masalah poligami dikerucutkan pada surah al-Nisa' [4]: 3. Secara umum, para penulis tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an di antaranya: Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Rayi* memahami bahwa sejak sebelum Islam datang tradisi poligami sudah ada.¹⁰⁸

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura, sebagai berikut:

... sistem lama poligami akan meningkatkan para cendekiawan di masyarakat untuk melahirkan anak lebih banyak ... Seorang bujangan yang sukses, atau seorang usahawan yang berhasil atau seorang petani yang cemerlang sebaiknya mempunyai istri lebih dari satu. Sebaliknya yang tidak berhasil

¹⁰⁸ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Bandung: Teraju, 2003, hlm. 314

mirip singa atau rusa jantan yang lemah di sebuah hutan dan harus menyerah kepada yang lebih kuat ...

Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah Saw. berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.¹⁰⁹

Menurut Abd al-Aziz al-'Arusi;

Ketetapan hukum Ilahi, dalam keadaan biasa, menghendaki agar laki-laki beristrikan satu. Adapun setelah usai peperangan, maka laki-laki yang berkemampuan diperintahkan agar beristrikan lebih dari satu, guna mencegah terjadinya penzaliman terhadap segolongan wanita, dan untuk mencegah meluasnya kerusakan dalam masyarakat. Sekarang tinggal kita mengetahui siapa laki-laki yang mampu mengawini lebih dari satu istri. Ia tentunya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dan kesehatan jasmani. Sebab perkawinan itu memerlukan harta, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, maka jumlah laki-laki yang mampu itu kecil, artinya jauh lebih kecil dari jumlah wanita yang tak berjodoh. Oleh karena itu wajib bagi orang mampu, untuk mengawini dua atau lebih dari mereka. Dan mengingat poligami merupakan beban dan bukan kesenangan, maka Allah telah menetapkan batas jumlah terbanyak istri itu pada empat saja. Berdasarkan ini, maka poligami itu adalah kewajiban manusiawi, guna memenuhi pelayanan sosial insani. Dan itu adalah suatu penyelesaian terpaksa dalam menghadapi kondisi khusus, dan bukan sebagai hak yang dibolehkan untuk setiap laki-laki, dalam setiap waktu dan dalam setiap kondisi, sebagaimana dikira orang dan sebagaimana dibenarkan oleh Undang-Undang.¹¹⁰

Sejalan dengan itu Mustafa al-Siba'i berpendapat:

Sesungguhnya poligami, khususnya poligami yang diatur Islam, adalah teori yang bermoral (*akhlaqiy*) dan humanis (*insaniy*). Ia disebut bermoral (*akhlaqiy*) karena ia tidak mengizinkan suami berhubungan dengan sembarang perempuan yang disukai, kapan pun dia mau. Suami dilarang mempunyai istri lebih dari empat. Suami dilarang berhubungan dengan salah satu di antara mereka secara rahasia. Tetapi harus berlandaskan akad dan harus diumumkan, meski hanya diketahui oleh orang dalam jumlah yang terbatas. Wali dan wanita harus mengetahui dan menyetujui ikatan ini, atau dalam artian tidak

¹⁰⁹ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Walisongo Press, 1995, hlm. 164-165 dan 166

¹¹⁰ Abdul Aziz Al-'Arusi, *Menuju Islam yang Benar*, terj. Agil Husin al-Munawar dan Hadri Hasan, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, hlm. 210

mengajukan penolakan. Sesuai dengan peraturan modern, hubungan ini harus tercatat dalam Kantor Urusan Agama. Selain itu, disunahkan bagi pihak laki-laki untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah*) dengan mengundang para kolega, disertai alunan kendang (musik) sebagai tanda kebahagiaan dan penghormatan.¹¹¹

Selanjutnya menurut Mustafa al-Sibai, poligami disebut humanis (*akhlaqiy*) karena ia meringankan beban laki-laki yang harus memikul tanggung jawab menafkahi perempuan yang tidak bersuami. Dengan menjadikan perempuan tersebut sebagai istri, laki-laki ini membawa sang perempuan ke dalam kehidupan rumah tangga yang terjaga kehormatannya. Di samping itu, laki-laki membayarkan "harga" hubungan biologis dengan mahar, perabot rumah tangga dan nafkah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menciptakan keturunan yang berkualitas.¹¹²

Dengan poligami, masih menurut Mustafa al-Sibai, suami tidak melempar beban tanggung jawab hamil hanya pada sang istri. Tetapi dia berbuat adil pada sang istri dengan memberinya nafkah ketika hamil dan melahirkan. Alasan lain yang menjadikan poligami humanis adalah karena suami mengakui anak-anak yang lahir dari istrinya. Dia mengatakan pada masyarakat bahwa anak-anaknya adalah buah dari rasa cinta yang mulia dan terhormat. Dia merasa bangga dengan mereka. Demikian pula dengan bangsa, mereka bangga dengan anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dalam kerangka prinsip poligami, sesungguhnya manusia membatasi nafsunya hingga batas-batas tertentu, namun dia melibatkan beban dan tanggung jawabnya sampai pada batas yang tak

¹¹¹ Mustafa al-Siba'i, *Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Pelurusan Tafsir Ayat Poligami*, Jakarta: Azan, 2002, hlm. 47

¹¹² *Ibid*, hlm. 48

terhingga. Tak dapat disangkal lagi, bahwa poligami adalah prinsip bermoral yang tetap mengedepankan akhlak. Ia juga bernilai humanis karena ia menjunjung nilai kemanusiaan.¹¹³

Sehubungan dengan pendapat di atas, Mahmud Yunus menyatakan:

Hikmahnya dibolehkan laki-laki beristeri lebih dari seorang, ialah karena pada umumnya kaum laki-laki sedikit jumlahnya dari pada kaum perempuan, terutama disebabkan karena banyak yang mati dalam peperangan. Oleh sebab itu laki-laki dibolehkan beristeri lebih dari seorang, supaya janda-janda yang kematian suami dapat bantuan dari pada suaminya yang kedua. Hal ini nyata dengan perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. Isteri-isteri beliau cuma seorang saja yang perawan, yang lain-lain semuanya janda, sebagai bukti, bahwa beliau beristeri lebih dari seorang, ialah karena membantu kehidupan perempuan-perempuan janda itu.¹¹⁴

Selanjutnya menurut Mahmud Yunus, lain dari pada itu Nabi beristeri kepada perempuan suku-suku Arab, untuk menarik hati suku-suku itu, agar mereka suka masuk agama Islam dan membantu Nabi untuk menyiarkan agama itu. Memang perhubungan semenjak itu salah satu alat untuk memperkuat perhubungan silatur rahim antara satu suku dengan yang lain, terutama di tanah Arab pada masa itu. Suku Bani Mushalaq masuk agama Islam, lantaran Nabi menikah dengan puteri anak rajanya, bernama Juwairiah. Hikmah yang lain ialah supaya umat Islam banyak berkembang, sehingga besar jumlah penduduknya. Dengan demikian umat Islam akan menjadi umat yang kuat, dapat mempertahankan agama dan negaranya, Umat yang sedikit jumlahnya dengan mudah dapat dijajah oleh bangsa yang kuat.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid*, hlm. 49

¹¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, hlm. 31

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 31

Syarat poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh al-Sunnah* menyatakan:

Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal. Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika dia takut berbuat zalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang

istri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin.¹¹⁶

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar *mashlahah-mursalah*, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami. Bandingkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 3,4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mandul, dan dengan syarat mendapat izin istri atau istri-istri yang terdahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.¹¹⁷

Dalam soal mahar, penulis berpendapat bahwa konsep pemikiran Muhammad Shahrur sangat bertentangan dengan pendapat para ulama yang pada intinya mewajibkan laki-laki memberikan mahar. Hal ini sebagaimana dikemukakan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Shidaq* ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*shidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2, tth, hlm. 189

¹¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukm Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 169

terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *shidaq* dinamakan juga dengan "*mahar*."¹¹⁸

Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta* menegaskan: Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah yang (juga jumlah terendah) untuk mewajibkan pemotongan tangan karena pencurian.¹¹⁹ Mahar adalah hak yang wajib untuk istri. Mahar adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.¹²⁰

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.¹²¹

Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*. Mahar adalah hak yang wajib untuk istri. Mahar adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai. Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surah an-Nisa, "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian dari mahar itu kepadamu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa': 4). Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah

¹¹⁸ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 88

¹¹⁹ Imam Malik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 282

¹²⁰ Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 228-229

¹²¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 105

diberikan kepada istrinya. Karena, Allah SWT telah berfirman di dalam surah an-Nisa, "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dusta yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan (istri-istri kamu) telah mengambil perjanjian yang kuat dan kamu." (QS. an-Nisa': 20-21). Mahar tidak mempunyai batas minimal dan tidak juga mempunyai batas maksimal. Mahar dapat berupa sejumlah uang yang banyak, dengan bersandar kepada firman Allah SWT, "Sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak." (QS. an-Nisa': 20).¹²²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar.

Dari pendapat-pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa pendapat Muhammad Shahrur berseberangan dengan ajaran Islam yang sudah standar. Dari sini pula tampak corak khusus pemikiran Muhammad Shahrur, ia mempunyai pendapat yang unik dalam menafsirkan kembali al-Qur'an dan Sunnah, secara khusus, dan dalam membangun hukum menjadi sebuah system komprehensif secara umum.

¹²² Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 228-229

Muhammad Shahrur adalah sosok fenomenal karena pemikirannya dahsyat, mengundang pro dan kontra. Bagi yang pro, memujinya, sedangkan bagi yang kontra, kitab-kitabnya, khususnya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*" dianggap lebih berbahaya dari *The Satanic Verses*-nya Salman Rushdie. Sudah banyak karya tulis yang hadir ke permukaan dalam rangka merespon pikiran-pikirannya, ada yang serius dan ada juga yang sebaliknya yaitu sekedar menyatakan tidak setuju secara emosional terhadap apa yang digagas oleh pembaharu dari Syiria ini.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Muhammad Shahrur tentang Kebolehan Poligami dengan Janda tanpa Mahar

Dibandingkan dengan pemikir muslim lain, Muhammad Shahrur adalah sosok pemikir yang "radikal" (mendasar). Dia membuang hampir seluruh peninggalan tradisi fiqh dan mengajak seluruh kaum Muslim memiliki komitmen pada diri mereka untuk memikirkan berbagai permasalahan yang kurang dikembangkan dalam fiqh tradisional, seperti demokrasi, lembaga-lembaga legislatif yang peka suara rakyat dan kebebasan manusia.

Dalam seluruh karyanya, Shahrur mendorong setiap Muslim di mana saja untuk berpikir melampaui doktrin normatif dan untuk terlibat dalam implementasi dan praktek nyata, yang juga berarti bahwa siapa pun dapat membuat kesalahan dan harus bersedia mengoreksinya. Seperti Blosof Jerman, Immanuel Kant, Shahrur percaya bahwa kata-kata yang tertulis tanpa bumbu ataupun hiasan akan mampu berbicara dengan sendirinya, dan dia

meletakkan tanggung jawab di atas pundak para pembacanya agar mengamalkan seruannya dalam bentuk diskusi dan debat publik serta kehidupan keagamaan yang lebih luas.

Sebelum memaparkan penafsiran kontemporer terhadap ayat-ayat hukum, Shahrur pada Bab I (satu) mengartikulasikan "alasan ontologis" mengapa hermeneutika (penafsiran) hukum al-Qur'an kontemporer itu perlu dilakukan. Untuk alasan pembenaran hermeneutiknya (penafsiran), dia memaparkan sebuah diskursus filsafat tentang hubungan antara "*al'kaynunaḥ*" (kondisi berada), "*as'sayrurah*" (kondisi berproses) dan "*as'sayrurah*" (kondisi menjadi. Shahrur berkata:

"Ketiga kata kerja (istilah) itu selalu menjadi pusat pembahasan (*mihwar*) dalam filsafat dan landasan inti bagi semua pembahasan teologis (Tuhan), naturalistik (alam) dan antropologis (manusia), dengan memandang bahwa *kaynunaḥ* atau *being* (keberadaan) adalah awal dari sesuatu yang ada, *sayrurah* (proses) adalah gerak perjalanan masa, dan *sayrurah* atau *becoming* (menjadi) adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi "keberadaan pertama" (*al'kaynunaḥ al'ula*) setelah melalui "fase berproses"¹²³

Dia yakin bahwa relasi antara ketiga kondisi tersebut merupakan suatu keniscayaan alami, dalam arti bahwa tidak ada satu kondisi pun" yang tidak terkait dengan kondisi-kondisi yang lain. Dari relasi ontologis inilah, menurut Shahrur, muncul secara terus menerus suatu hukum yang disebutnya dengan istilah 'hukum dialektika negatif (*qanun an' nafi wa nafi an'nafi*; 'hukum negasi dan penegasan negasi'). Hukum negasi ini berarti bahwa A adalah A, tetapi juga bukan A, atau dengan kata lain: dialektika internal. Sirkulasi dialektis antara "kondisi berada," "kondisi berproses" dan "kondisi menjadi"

¹²³ Sahiron Syamsuddin dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Elsaq Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

selalu terjadi pada setiap yang eksis, selain Tuhan. Karena itu, hukum ini berlaku secara umum baik pada makhluk yang mempunyai ruh atau yang tidak. Perbedaannya adalah bahwa makhluk yang mempunyai ruh, termasuk manusia, memainkan peranan yang sangat signifikan dalam mempercepat atau memperlambat jalannya sirkulasi dialektis tersebut. Shahrur berkata:

"Pada "kondisi menjadi" tersimpan masalah besar, yakni faktor keputusan dan kehendak manusia. Ia adalah faktor ketiga yang melaluinya kita dapat melihat sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan yang dialami oleh sekelompok manusia pada masa tertentu dan di tempat-tempat yang berbeda, sebagaimana kita pun dapat melihat sejauhmana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada sekelompok manusia di tempat yang sama, namun berbeda-beda masanya. Demikian ini kita namakan dengan pergeseran perkembangan sejarah. Dimensi kedua, yakni "kondisi berproses," yang dikaitkan dengan dimensi ketiga (yakni "kondisi menjadi") adalah hal yang kita sebut dengan pergeseran perkembangan sejarah atau "kondisi menjadi" secara historis (*cis-sayrurah at-tankhiyyah*), di mana manusia sangat berperan secara mendasar dan efektif dalam hal mempercepat atau memperlambat proses tersebut.¹²⁴

Berangkat dari hal ini, Shahrur berpendapat bahwa dunia Arab untuk tidak mengatakan dunia muslim pada saat ini dapat dipandang sebagai dunia yang statis (paling tidak kurang dinamis), karena hanya berada pada dua dimensi, yakni dimensi "kondisi berada" dan dimensi "kondisi berproses." Ia memiliki dimensi "kondisi berada," karena memang secara faktual ia eksis. Ia juga mengalami dimensi "kondisi berproses," karena secara historis ia berada bersama perjalanan waktu. Sementara itu, dimensi "kondisi menjadi" baik dalam bidang ilmu-ilmu alam, teknologi dan ilmu-ilmu sosial atau humaniora tidak dimilikinya, atau dengan kata lain berkembang dengan sangat lamban.

¹²⁴ *Ibid*, hlm.3

Setelah itu, Shahrur mengaitkan teori dialektika ini dengan pemahaman terhadap *at-Tanzil al-Hakim*. Pertama-tama, dia mengemukakan keyakinan bahwa *at-Tanzil al-Hakim*, baik teks maupun kandungannya, adalah wahyu Allah. Karena itu, ia bersifat *quddus* (suci atau sakral) dalam arti bahwa ia memiliki "karakter kehidupan" (*sifat al'hayah*), yakni bahwa wahyu Allah itu eksis pada dirinya, dan bahwa pemahaman terhadapnya selalu berkembang dan dinamis, di mana "kondisi berposes" dan "kondisi menjadi" dalam hal pemahaman terjadi secara berkesinambungan. Dari sini seseorang dalam menginterpretasikan *at-Tanzil al-Hakim* memandang seakan-akan *at-Tanzil al-Hakim* diwahyukan kepada generasinya; "seakan-akan Rasulullah baru saja wafat dan menyampaikan kitab ini kepada umat manusia. Jelaslah bahwa penafsiran *at-Tanzil al-Hakim*, menurut Shahrur, selalu terbatas dan bersifat relatif. Shahrur berkata:

"Abad ketujuh itu berbeda dengan abad kesepuluh, dengan abad kedua puluh atau dengan abad keempat puluh. Manusia dari masing-masing abad tersebut berbeda-beda dalam hal tingkat pengetahuan, perangkat-perangkat saintifik, problem-problem sosial, ekonomi dan politik serta problematika pengetahuan. Semua akan membaca *at-Tanzil al-Hakim* dalam kerangka tingkat pengetahuan dan problematika tersebut di atas yang membatasinya. Mereka mendapati atau memahami dalam *at-Tanzil al-Hakim* hal-hal yang tidak didapati oleh yang lain. Hal ini menegaskan bahwa *at-Tanzil al-Hakim* mengandung "karakter kehidupan," memiliki "kondisi berada" pada dirinya, dan mengandung "kondisi berproses" dan "kondisi menjadi" untuk lainnya (yakni: interpretasi). Inilah yang selalu kami maksud, ketika berbicara tentang "tetapnya teks dan bergeraknya kandungan makna, dan tentang dialektika teks dan kandungan makna."¹²⁵

Berangkat dari hal itu, Shahrur memandang pemahaman dan aplikasi Nabi Muhammad terhadap hukum *at-Tanzil al-Hakim*, yang biasa dikenal

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

dengan *as'sunnah an'nabawiyyah* (Sunnah Nabi), bukan sebagai "wahyu kedua," melainkan hanya sebagai "pemahaman awal" terhadap *at-Tanzil al-Hakim*, dalam arti bahwa ia bersifat terbatas dan relatif. Shahrur mengatakan:

"Dari sini kami sampai pada satu pendapat bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap makna-makna al-Quran baik yang bersifat *kulli* (garis besar) maupun *juz'i* (partikular). Seorang Nabi ataupun Rasul sekalipun tidak mungkin melakukannya, karena dengan kemampuannya memahami seluruh makna al-Qur'an berarti dia telah menjadi sekutu Tuhan dalam pengetahuan-Nya yang bersifat *kulli* dan dalam hal "keberadaan-Nya" pada Dzat-Nya (*kaynunah Tahatih*). Seandainya Rasulullah Saw mengetahui seluruh kandungan al-Qur'an secara *kulli* dan *juz'i*, serta kemungkinan-kemungkinan umum dalam hal penafsiran dan ijtihadnya, maka hal ini berarti bahwa dia menjadi sekutu bagi Allah dalam hal pengetahuan, atau bahwa dia adalah pengarang al-Qur'an itu sendiri.¹²⁶

Pandangan semacam ini membawa Shahrur pada satu pendapat bahwa Nabi Muhammad Saw adalah mujtahid pertama yang telah membumikan "merelatifkan" hukum-hukum ilahi yang absolut melalui Sunnahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu. Sunnah Nabi dipandang hanya sebagai "cermin awal yang benar" (*al-mir'ah as'sadiqah al'ula*) bagi pemahaman. Dan aplikasi hukum ilahi, yang merupakan hasil interaksi antara wahyu Tuhan dan dunia objektif pada saat itu. Namun, Sunnah Nabi bukanlah satu-satunya bentuk pemahaman terhadap *at-Tanzil al-Hakim* dan bukan pula bentuk terakhir aplikasi hukum-hukum ilahi. Hanya Sunnah Nabi yang berkaitan dengan ritual keagamaan (*sha'a'ir*: shalat, zakat, puasa dan haji) dan norma norma etika yang berlaku sepanjang masa.

Jelaslah bagi kita bahwa Shahrur menekankan relativitas hermeneutic dalam hal penafsiran terhadap Kitab Suci, dalam arti bahwa setiap generasi

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 5.

mempunyai kebebasan untuk menafsirkannya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat, serta sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia. Ketepatan (kebenaran) penafsiran, bagi Shahrur, diukur oleh apakah ia sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penafsiran itu dilakukan. Hal ini berarti bahwa manusia modern dapat menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan kontemporer, tanpa harus berkonsultasi dengan karya-karya tafsir terdahulu, karena tuntutan dan situasi pada masa sekarang berbeda dari masa lalu. Shahrur berkata:

"Adapun tentang hal-hal selain yang telah disebutkan di atas, yakni mu'amalat dan aturan hukum sipil (*tashri*), tidaklah dibutuhkan adanya kesamaan dan kesesuaian antara apa yang kita butuhkan sekarang dan apa yang telah berkembang pada masa-masa terdahulu. Hal itu karena ketepatan ijtihad ditentukan oleh kesesuaian antara ijtihad dan realitas. Jadi sebuah hasil ijtihad bisa dipandang benar dan diterima jika seiring dengan realitas objektif, dengan kata lain, jika seorang pembaca (penafsir) teks al-Qur'an memahami realitas objektif pada saat melakukan "pembacaan historis." Pemahaman dan keserasian dengan realitas objektif merupakan tolok ukur apakah atau seberapa jauh sebuah penafsiran atau pembacaan hermeneutic itu benar atau salah.¹²⁷

Sekarang pertanyaannya adalah: metode apa yang diterapkan oleh pemikir kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an? Berdasarkan pemaparan Shahrur dalam bukunya itu dan uraian-uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Shahrur menggunakan paling tidak dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang wasiat, pembagian harta warisan, kepemimpinan, pakaian wanita, dan khususnya poligami tanpa mahar. Metode-metode yang dimaksud ialah (1) analisis *linguistik semantik*,

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 6.

dan (2) penerapan "ilmu-ilmu eksakta modern", seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Berkaitan dengan metode pertama, Shahrur menerapkan teori linguistik yang pernah dikemukakan oleh al-Jurjani— sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Andreas Christmann dalam hal sinonimitas dan "komposisi" (*an'nayn*). Dalam hal menganalisis makna kata-kata dalam al-Qur'an Shahrur tampaknya menerapkan analisa '*paradigmo-sintagmatik*'—meminjam istilah tersebut dari Osborne dalam bukunya *The Hermeneutical Spiral*. Analisa paradigmatis adalah sebuah analisa bahasa yang digunakan seseorang untuk memahami makna kata dengan cara membandingkannya dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna yang bertentangan. Hanya saja, dalam hal ini dia tidak sepakat dengan ahli bahasa yang mengatakan adanya persamaan kata/"sinonim penuh" (*taraduf*) dalam al-Qur'an. Shahrur setuju dengan ahli bahasa, seperti Ibn Paris, yang mengatakan bahwa setiap kata memiliki makna spesifik yang tidak terkandung oleh kata lain. Sebaliknya, sebuah kata dimungkinkan mempunyai lebih dari satu 'potensi makna' (*mushtarak al-ma'am*). Salah satu faktor penting yang dapat membantu menentukan makna potensial mana yang secara rasional tepat untuk sebuah kata adalah konteks tekstual di mana kata yang dimaksud digunakan dalam konteks tersebut. Analisa bahasa yang berkaitan dengan konteks tekstual inilah yang disebut dengan istilah "analisa sintagmatik", yakni bahwa makna sebuah kata dipengaruhi oleh hubungan *linier* dengan kata-kata lain yang turut membangun sebuah kalimat. Masalah sinonimitas ini

sudah sejak lama didiskusikan oleh ahli-ahli bahasa Arab. Sebagian dari mereka, seperti Sibawayh, Ibn Khalawayh dan al-Asmal berpendapat bahwa kata-kata sinonim dapat ditemukan dalam al-Qur'an, sementara yang lain, seperti Abu Hilal al-'Askari, Ibn Paris dan ar-Raghib al-Asfahani mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini, menurut 'Adil at-Tall, disebabkan salah satunya oleh perbedaan jawaban atas pertanyaan apakah bahasa al-Qur'an itu *tawqif* (formulasi Tuhan) ataukah istilah (konstruksi manusia, meskipun kandungannya bersifat *ilahi*). Keyakinan bahwa bahasa al-Qur'an adalah formulasi Tuhan mengarah kepada penolakan terhadap kemungkinan adanya sinonimitas dalam al-Qur'an. Sebaliknya, orang-orang yang menerima adanya sinonimitas berargumentasi bahwa ia adanya konstruksi manusia, meskipun kandungannya bersifat ilahi (inspirasi Tuhan). Shahrur sependapat dengan ahli bahasa yang menolak adanya kata-kata sinonim. Shahrur bahkan yakin bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat sinonimitas dalam hal struktur kalimat. Untuk itu, Shahrur mengemukakan argumentasi religius bahwa penggunaan kata dan struktur kalimat dalam al-Qur'an adalah sempurna, karena ia adalah wahyu Tuhan. Lebih lanjut, Shahrur beranalog sebagai berikut:

"Jika kita membaca sebuah buku tentang kedokteran atau teknik yang ditulis dalam bahasa apapun, maka kita tidak akan menemukan fenomena sinonimitas di dalamnya. Jika sebuah sel berbeda dari sel lain, maka penyusun buku akan memberikan nama lain terhadap sel tersebut, meskipun perbedaannya itu sangat kecil. Demikian juga, ketika sebuah batasan yang belum diketahui dalam matematika berbeda dengan batasan yang lain, maka penyusun buku itu akan memberikan simbol-simbol yang berbeda (S1, S2, S3). Demikian itu dalam rangka ketelitian ilmiah. Mengapa hal ini (tidak adanya sinonimitas dalam bidang ilmu pengetahuan demi ketelitian ilmiah) yang notabene berasal dari manusia kita terima dan kita akui dengan ketelitian ilmiah, sementara di sisi lain kita bersikeras mengatakan bahwa simbol-simbol (terma-terma) dalam Kitab Allah adalah sama (sinonim)?. Bagaimana

mungkin makhluk Tuhan dalam hal pengungkapan lebih teliti (lebih persis) daripada Tuhannya dalam hal pewahyuan?¹²⁸

Teori ketidakadaan sinonimitas ini diaplikasikan oleh Shahrur secara konsisten dalam seluruh karya-karyanya.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 8.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Shahrur sesungguhnya Allah Swt, tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.
2. Dalam hubungannya dengan mahar, Muhammad Shahrur menyatakan: sebagai kemudahan dari Allah terhadap persoalan mengawini ibu dari anak-anak yatim tersebut, maka Dia memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan maskawin dengan maksud mencari ridla Allah dengan mengawini mereka dan mengasuh anak-anak yatimnya. Pendapat Muhammad Shahrur di atas menunjukkan bahwa dalam pandangannya, mahar bukan suatu kewajiban yang harus dibayar dalam perkawinan poligami.
3. Muhammad Shahrur memaparkan metode penafsiran ayat-ayat hukum (bagian dari ayat-ayat *muhkamat*) yang berkaitan dengan masalah

poligami dan mahar. Berdasarkan pemaparan Shahrur dalam bukunya, dapat disimpulkan bahwa dia menggunakan paling tidak dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami, dan mahar. Metode-metode yang dimaksud ialah (1) analisis linguistik semantik, dan (2) penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

4. Pendapat Muhammad Shahrur bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat-pendapat ulama.

B. Saran-Saran

Hendaknya masyarakat dan para ulama tidak menyudutkan Muhammad Shahrur, meskipun pendapatnya sangat kontroversial. Namun setidaknya dapat dijadikan studi banding dalam mengkaji hukum Islam yang selalu dinamis dalam menjawab peristiwa-peristiwa baru. Untuk itu pendapat Shahrur jika tidak bisa dijadikan pegangan tapi paling tidak dapat menjadi wacana dalam rangka memperluas wawasan berpikir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, Juz 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth
- Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999
- Anwar, Moch., *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980
- As-San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960
- Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fanani, Muhyar, "Muhammad Syahrur dan Konsepsi Baru Sunnah" dalam *Teologia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2004, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999
- Ibn Anas Imam Malik, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth

- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991
- Shahrur, Muhammad, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta: Elsaq Press, 2004
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Irianto, lahir di Lubuk Ambacang 16 April 1982 anak ke-lima dari Alm. M.Rasid dan Julianis yang beralamat di Dusun Anggrek, Lubuk Ambacang Kabupaten Kuantan Singingi, Hp. 081365012934 e-mail: yamilove16@yahoo.com.

Pengalaman pendidikan yang dilalui dimulai pada SD Negeri 010 Lubuk Ambacang tahun 1990-1996 dan dilanjutkan SLTP Negeri 03 Lubuk Ambacang. Setamat SLTP, pendidikan dilanjutkan di MA Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2002.

Kemudian kuliah di Jurusan Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau dan lulus pada tahun 2010.

Penelitian Skripsi berjudul ***“PENDAPAT MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG KEBOLEHAN POLIGAMI DENGAN JANDA TANPA MAHAR”***.